

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Portal Berita *Online* Floresa.co

Setelah mengumpulkan data penelitian, penulis akan menyajikan hasil penelitian tersebut. Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan data penelitian yang memberikan dukungbaban terhadap penelitian ini. Data penelitian mencakup rangkuman sejarah portal berita Floresa.co, serta lima teks berita Floresa.co yang terbit pada rentang waktu 4 Maret – 9 Juni 2025 terkait Pembangunan Geothermal di Poco Leok.

4.1.1 Sejarah Portal Berita *Online* Floresa.co

Floresa.co didirikan pada tahun 2014 sebagai sebuah portal berita yang berbasis di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejak awal pendiriannya, Floresa.co berkomitmen untuk mengawal proses-proses pembangunan di Provinsi NTT, khususnya di wilayah Flores yang tengah mengalami transformasi dalam era pasca-desentralisasi dan skema pembangunan nasional yang kian terfokus ke kawasan timur Indonesia.

Di tengah gencarnya pembangunan yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi, berbagai persoalan krusial ikut mencuat, seperti pencaplokan sumber daya alam, perampasan hak-hak masyarakat adat, kerusakan lingkungan, hingga alih fungsi kawasan konservasi menjadi lahan industri pariwisata dan tambang. Dalam konteks konflik dan ketimpangan kekuasaan yang begitu kuat,

Floresa.co hadir sebagai media alternatif yang kritis dan berpihak kepada kelompok rentan serta masyarakat yang terpinggirkan.

Portal ini bernaung di bawah badan hukum PT Floresa Media Utama, dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah NTT. Dalam perjalanannya, Floresa.co telah menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Kurawal, Sunspirit for Justice, Rumah Baca Aksara, serta media-media nasional seperti Tempo dan Project Multatuli. Dukungan juga datang dari jaringan jurnalis lingkungan hidup global, seperti Earth Journalism Network.

Komitmen Floresa.co terhadap jurnalisme yang berpihak dan independen mendapatkan pengakuan luas melalui berbagai penghargaan, seperti:

- Udin Award 2023 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- MAW Talk Award 2024 sebagai Lembaga Media Berpengaruh
- AMSI Awards 2024 untuk inovasi kanal KoLiterAksi dalam kategori engagement dan reader revenue terbaik.

4.1.2 Visi dan Misi Portal Berita *Online* Floresa.co

Visi dari portal berita *online* Floresa.co adalah Menjadi media kritis yang berdiri bersama rakyat kecil dan menjadi bagian dari gerakan perubahan yang menjunjung nilai keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan hak asasi manusia, khususnya di wilayah Flores dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan misinya adalah:

1. Mengawal proses pembangunan di NTT, terutama yang menyangkut hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
2. Menyuarakan isu-isu yang berdampak pada kelompok rentan, terpinggirkan, dan kurang mendapat perhatian publik.
3. Membangun jurnalisme berbasis keberpihakan, yang tidak sekadar netral, tetapi memilih posisi etis dalam menghadapi ketimpangan dan ketidakadilan.
4. Berjejaring dengan komunitas lokal, media nasional, dan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat dampak pemberitaan dan advokasi.
5. Mengembangkan inovasi media lokal yang mendorong keterlibatan pembaca (audience engagement) dan keberlanjutan media berbasis komunitas.

4.1.3 Struktur Organisasi Portal Berita *Online* Flores.co

Struktur organisasi Flores.co mencerminkan pola kerja media komunitas yang ramping namun fungsional, dengan pembagian peran yang jelas antara tim redaksi, reporter, litbang (penelitian dan pengembangan), serta administrasi dan keuangan.

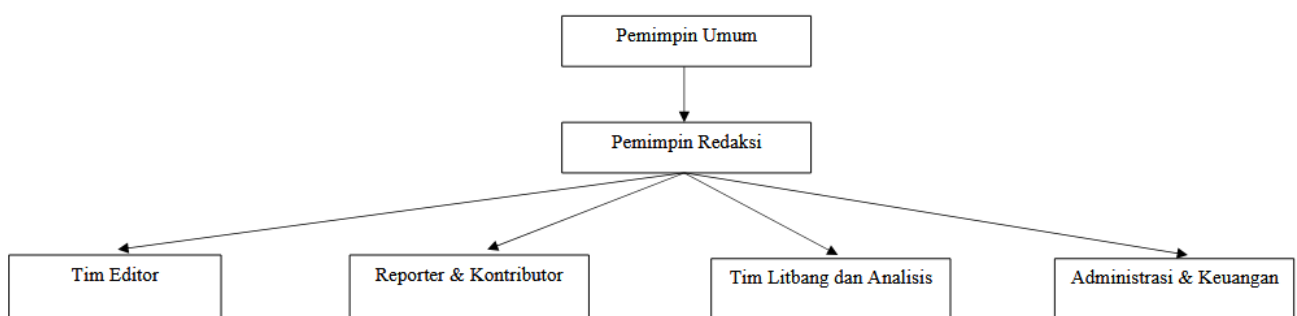
Di pucuk pimpinan, terdapat Pemimpin Umum yang menangani arah kebijakan strategis media, sementara fungsi editorial dijalankan oleh Pemimpin Redaksi yang bertanggung jawab terhadap konten pemberitaan dan koordinasi tim redaksi. Saat ini, posisi Pemimpin Redaksi dijabat oleh Herry Kabut.

Tim editorial terdiri dari para editor yang menangani berbagai rubrik dan koordinasi dengan kontributor. Reporter dan kontributor tersebar di beberapa wilayah strategis di Flores dan Nusa Tenggara Timur, mencerminkan orientasi liputan yang dekat dengan komunitas lokal. Sementara itu, tim litbang berfungsi mengembangkan analisis mendalam serta penelitian tematik yang menjadi kekuatan khas Floresa.co, dengan dukungan dari individu-individu yang juga aktif dalam dunia akademik.

Selain itu, divisi administrasi dan keuangan turut menopang keberlangsungan operasional harian media ini. Struktur ini tidak hanya mendukung efektivitas kerja internal, tetapi juga merepresentasikan pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang menjadi ciri khas media komunitas berbasis advokasi seperti Floresa.co.

Bagan berikut menggambarkan struktur organisasi tersebut secara visual:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Floresa.co



4.2 Penyajian Data Hasil

Data yang disajikan dalam bagian ini bersifat deskriptif kualitatif, sebagaimana telah dijelaskan dalam penjabaran jenis penelitian sebelumnya. Data tersebut mencakup paragraf, kalimat, hingga kata-kata yang terdapat dalam lima berita mengenai Pembangunan Geothermal di Poco Leok yang dimuat di Portal Berita *Online* Floresa.co. Pemilihan berita dilakukan berdasarkan publikasi yang terbit antara tanggal 4 Maret 2025 hingga 9 Juni 2025.

Tabel 4.1

**Teks Berita: Periode Kedua Bupati Nabit Disambut Aksi Unjuk Rasa Desak
Pencabutan SK Penetapan Lokasi Proyek Geothermal Poco Leok**

Edisi: Selasa, 4 Maret 2025

Alinea	Isi Berita
Alinea 1	Tak lama setelah Heribertus G. L. Nabit dilantik untuk periode kedua kepemimpinannya sebagai Bupati Manggarai, ratusan warga dari Aliansi Pemuda Poco Leok menggelar aksi demonstrasi mendesaknya mencabut Surat Keputusan [SK] terkait penetapan lokasi [Penlok] proyek geothermal.
Alinea 2	Massa tersebut, yang melakukan aksi pada 3 Maret, berjalan kaki mulai dari Jalan Pelita, Kecamatan Langke

	Rembong, tepatnya di samping Gereja Katedral St. Maria Assumpta Ruteng.
Alinea 3	Mereka mendesak pemerintah menghentikan seluruh aktivitas terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi [PLTP] itu, termasuk pengerahan aparat keamanan untuk mengawal perusahaan PT PLN serta pengadaan lahan oleh Badan Pertanahan.
Alinea 4	Pantauan Floresca di lokasi, massa membawa berbagai spanduk dengan tulisan seperti “Kami Tolak Geotermal Poco Leok”, “Bupati Punya Otak Tolak Geotermal”, “Kami Hidup Mengolah Tanah Bukan Menjual Tanah”, “Hentikan Pendanaan Proyek Geotermal Poco Leok oleh Bank KFW-Jerman”, dan “Poco Leok Harga Mati, Rawat Ruang Hidup”.
Alinea 5	Puluhan polisi dan polisi pamong praja tampak mengawal jalannya aksi.
Alinea 6	Kristianus ‘Tino’ Jaret, Koordinator Aksi, menyampaikan dari mobil komando bahwa ini adalah aksi kedua setelah sebelumnya massa dari sepuluh kampung adat di Poco Leok melakukan aksi serupa pada 9 Agustus 2023.

Alinea 7	Massa yang berjalan kaki sambil meneriakkan yel-yel “Tolak Geotermal” tiba di depan Kantor DPRD Manggarai pada pukul 11.15.
Alinea 8	Mereka menuntut para anggota dewan untuk menerima mereka dalam audiensi.
Alinea 9	“Kami datang ke kantor DPRD dengan tujuan yang sama, menyuarakan bahwa kami tetap satu suara, kami tetap solid, dan kami pemuda Poco Leok tidak akan pernah melepaskan ruang hidup kami,” kata Tino saat berorasi di depan Kantor DPRD di Jalan Diponegoro.
Alinea 10	Tino juga menyebut DPRD memiliki peran strategis dalam menyuarakan kepentingan rakyat.
Alinea 11	“Kita memilih mereka bukan untuk kepentingan investor. Namun, jika hari ini mereka berseberangan dengan kita, itu berarti mereka tidak lagi membawa kepentingan rakyat, melainkan kepentingan setan,” tegasnya.
Alinea 12	Sementara itu, Masyudi Onggal, salah satu pemuda Poco Leok menegaskan “aksi ini lahir dari kesadaran akan ancaman nyata terhadap ruang hidup kami.”
Alinea 13	“Kami anak-anak para petani datang ke kantor DPRD untuk sekali lagi meminta seluruh anggota dewan

	menunjukkan taringnya. Kami ingin mereka bertarung bersama kami melawan kebijakan yang menyengsarakan kami saat ini,” katanya.
Alinea 14	Yudi menyinggung keputusan Bupati Manggarai, Hery Nabit, yang menetapkan lokasi proyek geotermal secara sepihak pada 2022 tanpa adanya sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat adat Poco Leok.
Alinea 15	“Proyek ini dipaksakan tanpa meminta kesepakatan dan persetujuan seluruh masyarakat adat Poco Leok. Kami merasa diabaikan, bahkan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah yang seharusnya melindungi hak-hak kami,” ujarnya.
Alinea 16	Lebih lanjut, ia menuntut agar DPRD bekerja untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang terdampak proyek ini.
Alinea 17	“Banyak dari kami yang menjadi korban dari agenda tersembunyi yang tidak berpihak pada rakyat,” katanya.
Alinea 18	Ia juga menyebut “aksi ini bukan sekadar bentuk perlawanan, tetapi muncul dari kesadaran dan pengalaman masyarakat tentang dampak buruk proyek geotermal.”

Alinea 19	“Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap tanah leluhur kami, masa depan kami, dan keberlanjutan hidup kami,” katanya.
Alinea 20	Setelah bernegosiasi dengan tiga orang anggota dewan di gerbang kantor tersebut, 25 orang perwakilan massa masuk ke dalam kantor DPRD Manggarai pada pukul 11.45 untuk beraudiensi.
Alinea 21	Mereka diterima oleh Tomas Tahir, Wakil Ketua DPRD; Klemens Malis, Ketua Komisi C yang membidangi urusan pembangunan; Dominikus Hima, Sekretaris Komisi C; Arlan Nala, Anggota Komisi B; Aven Mbejak; serta Yosef Hasmi yang bertindak sebagai moderator.
Alinea 22	Tino Jaret berkata di ruangan itu bahwa mereka datang untuk menanyakan langkah konkret DPRD terkait polemik geothermal Poco Leok.
Alinea 23	“Sampai hari ini, kami tidak pernah mengetahui apa yang telah dilakukan para anggota dewan,” ujarnya.
Alinea 24	Menanggapi hal tersebut, Dominikus Hima menjelaskan bahwa dari 35 anggota DPRD periode 2024-2029, mayoritas atau 19 orang merupakan wajah baru, “termasuk kami yang hari ini menerima audiensi dengan warga.”

Alinea 25	Ia juga menegaskan bahwa proyek di Poco Leok adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional [PSN] yang kewenangannya berada di pemerintah pusat.
Alinea 26	“Kami tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menerima atau membatalkan proyek ini. DPRD dan eksekutif memiliki peran masing-masing dalam menyikapi persoalan ini. Kami memahami seluruh prosesnya dari pusat hingga daerah,” jelasnya.
Alinea 27	Agustinus Tuju, salah satu perwakilan warga yang ikut dalam audiensi menyebut “adanya manipulasi dalam proyek PLTP yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat.”
Alinea 28	“Dalam sosialisasi awal, pemerintah tidak pernah memberitahukan dampak buruk dari proyek ini. Mereka hanya menyampaikan sisi positif, seperti akan ada penerangan listrik,” ungkap Agustinus.
Alinea 29	“Ruang hidup kami mencakup gendang, lingko, wae, batas, dan compang,” katanya merujuk pada rumah adat, tanah ulayat, mata air, halaman kampung dan mezbah persembahan kepada leluhur.

Alinea 30	“Jika salah satu dari ini dialihfungsikan, maka percuma kami hidup di Poco Leok,” lanjutnya.
Alinea 31	Menurutnya, “proyek ini lebih banyak didukung oleh pihak yang tidak tinggal di Poco Leok, sementara warga yang menetap harus menanggung risikonya.”
Alinea 32	“Yang menjual lahan dan mendukung proyek ini bukan orang yang tinggal di Poco Leok, melainkan mereka yang tinggal di luar. Risiko seperti tanah longsor dan amblas tidak akan mereka rasakan, tapi kami yang bertahan di sini yang akan terdampak,” tambahnya.
Alinea 33	Ia juga menambahkan bahwa “listrik baru masuk ke Poco Leok pada Desember 2019, padahal PLTP Ulumbu sudah beroperasi sejak 2011.”
Alinea 34	“Sosialisasi awal dilakukan bersamaan dengan pemasangan tiang listrik,” tambahnya.
Alinea 35	Tadeus Sukardin, warga lainnya menegaskan, “masyarakat sudah menolak proyek ini sejak awal, bahkan sebelum mengetahui dampak buruknya.”
Alinea 36	“Tanah ini adalah tanah ulayat yang tidak bisa diganggu gugat atau diubah identitasnya. Namun, pemerintah tetap memaksa masuk,” ujarnya.

Alinea 37	Menurutnya, berbagai aksi penolakan yang dilakukan masyarakat tidak direspons dengan baik oleh pemerintah.
Alinea 38	“Dengan berbagai aksi yang kami lakukan, baik di Ruteng maupun di lapangan, pemerintah terus mendesak dan memaksa. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap masyarakat adat,” tegasnya.
Alinea 39	Ia juga menyoroti SK Penetapan Lokasi yang dikeluarkan tanpa persetujuan masyarakat adat.
Alinea 40	“Tanah ini bukan milik bupati. Ini adalah pelecehan besar-besaran terhadap masyarakat adat,” katanya
Alinea 41	Menanggapi pernyataan warga, Arlan Nala mengakui pihaknya sudah banyak mengetahui situasi lapangan kasus proyek tersebut.
Alinea 42	Sebagai mantan jurnalis, ia mengklaim mengetahui berbagai kejadian di lapangan, termasuk kasus kekerasan aparat keamanan terhadap warga dan jurnalis di lokasi proyek.
Alinea 43	Kekerasan yang dimaksud Nala terjadi pada 2 Oktober 2024, di mana sejumlah warga dan Pemimpin Redaksi Flores Herry Kabut dipukul dan ditangkap aparat keamanan saat aksi protes terkait proyek itu.

Alinea 44	Karena itu, kata dia, pihaknya “akan menyampaikan aspirasi masyarakat Poco Leok kepada Bupati Manggarai.”
Alinea 45	“Aspirasi dari masyarakat Poco Leok ini akan menjadi poin prioritas yang kami akan suarakan ke Bupati Manggarai, bawah pertimbangan lagi SK itu. Lihatlah, masyarakat di sana terus menjerit,” ujar Arlan.
Alinea 46	Sementara itu, Klemens Malis menegaskan pihaknya mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap warga penolak proyek.
Alinea 47	Setelah audiensi dengan anggota DPRD, massa aksi bergerak menuju Kantor Bupati Manggarai pada pukul 12.45.
Alinea 48	Di depan kantor tersebut, warga kembali berorasi, menuntut Nabit menemui mereka untuk berdialog dan menyatakan pencabutan SK Penetapan Lokasi.
Alinea 49	Setelah beberapa saat, beberapa pegawai dan aparat keamanan membuka pintu gerbang dan meminta 25 perwakilan massa untuk masuk dan beraudiensi.
Alinea 50	Selain Nabit, Sekretaris Daerah Fansi Aldus Jahang juga hadir dan bertindak sebagai moderator. Selain itu, ada

	beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah yang turut hadir.
Alinea 51	Tadeus Sukardin yang berbicara mewakili warga menegaskan bahwa “sejak awal masyarakat adat Poco Leok tidak pernah merasa nyaman dengan proyek geotermal yang akan dibangun.”
Alinea 52	“Kami hadir di sini karena Bapak Bupati telah mengeluarkan SK Penetapan Lokasi di Poco Leok tanpa konfirmasi kepada kami. Padahal, kami sebagai masyarakat adat telah sejak awal menyatakan penolakan terhadap proyek ini,” ujarnya.
Alinea 53	Tadeus juga mempertanyakan “dasar penetapan SK tersebut dan meminta agar data yang digunakan sebagai dasar keputusan itu diverifikasi ulang.”
Alinea 54	“Kami merasa dilecehkan. SK tersebut ditetapkan tanpa mempertimbangkan aspirasi kami,” katanya.
Alinea 55	Selain itu, ia mempertanyakan distribusi listrik dari pembangkit geotermal yang ada, karena menurutnya, “listrik dari Ulumbu justru lebih banyak dialirkan ke daerah lain dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan warga Manggarai sendiri.”

Alinea 56	“Jika memang proyek ini untuk kepentingan masyarakat Manggarai, mengapa listrik dari Ulumbu justru dijual ke daerah lain?,” katanya.
Alinea 57	Menanggapi Tadeus, Nabit menyatakan bahwa “keputusan terkait proyek geotermal di Poco Leok dibuat berdasarkan kebutuhan energi untuk masyarakat Manggarai.”
Alinea 58	Ia berkata “tidak ada niat dari pemerintah untuk merusak lingkungan atau mengabaikan budaya lokal.”
Alinea 59	“Niat saya sejak awal hanya ingin memastikan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat Manggarai. Sayangnya, kita terbatas dalam sumber energi. Di Poco Leok, geotermal adalah satu-satunya sumber energi yang dapat diandalkan,” jelasnya.
Alinea 60	Ia juga menambahkan bahwa “masyarakat Manggarai sangat bergantung pada ketersediaan listrik, termasuk untuk sektor pendidikan dan ekonomi.”
Alinea 61	“Listrik bukan hanya untuk penerangan rumah tangga, tetapi juga untuk industri. Kita menerima banyak permohonan pembangunan usaha di beberapa daerah, seperti pabrik pengolahan ikan di Reo. Namun, karena

	keterbatasan listrik, hal itu tidak bisa diwujudkan,” katanya.
Alinea 62	Menanggapi kritik terkait distribusi listrik ke daerah lain, Hery menjelaskan bahwa “listrik yang dialirkan ke daerah seperti Labuan Bajo [ibukota Kabupaten Manggarai Barat] juga bermanfaat bagi masyarakat Manggarai.”
Alinea 63	“Listrik yang digunakan di Labuan Bajo bukan hanya untuk kepentingan pihak luar, tetapi juga untuk usaha-usaha yang melibatkan masyarakat Manggarai, seperti hotel dan restoran. Banyak anak-anak Manggarai yang bekerja di sana,” paparnya.
Alinea 64	Agustinus Sukarno, salah satu pemuda Poco Leok menanggapi pernyataan Nabit bahwa proyek geotermal bukan untuk kepentingan masyarakat Manggarai, melainkan untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata di Labuan Bajo.
Alinea 65	“Untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata, artinya industri dari Labuan Bajo untuk kepentingan investor, bukan kepentingan listrik kita sebagai masyarakat Manggarai,” tegasnya.

Alinea 66	Sementara Masyudi Onggal menilai “bupati lebih mementingkan investasi di Labuan Bajo ketimbang kepentingan warga Manggarai sendiri.”
Alinea 67	Ia mengkritisi respons Nabit yang menyebut listrik dari geothermal Poco Leok akan menambah lapangan kerja di sektor industri, termasuk warga Manggarai yang bekerja di bidang pariwisata di Labuan Bajo.
Alinea 68	“Kami petani akan kehilangan lapangan pekerjaan karena tanah-tanah adat yang kami garap diambil untuk kepentingan investasi. Anda berpikir soal energi, kami berpikir soal pangan. Ini dua konsep yang berbeda,” katanya.
Alinea 69	Yudi juga menyebut “rencana eksploitasi 40 megawatt listrik dari Poco Leok akan mengorbankan puluhan ribu warga.”
Alinea 70	Sedangkan Tino Jaret mengkritik pernyataan Nabit mengenai rasio lahan yang terdampak, menyebut kasus geothermal adalah isu lingkungan yang tidak bisa disederhanakan hanya sebagai soal jual beli dan sertifikasi lahan.

Alinea 71	“Kita menolak geotermal karena dampaknya terhadap lingkungan,” ujarnya.
Alinea 72	Tino juga menyoroti “kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga dan jurnalis yang meliput aksi protes.”
Alinea 73	“Kekerasan yang dilakukan aparat tidak hanya menysasar warga, tetapi juga jurnalis Flores. Dalam sidang etik pada 24 Februari, polisi yang melakukan pemukulan terhadap jurnalis tersebut dinyatakan bersalah,” ujarnya.
Alinea 74	Sementara itu, Nabit membantah penggunaan istilah ‘mengorbankan’ dalam proyek ini.
Alinea 75	“Saya tidak pernah menggunakan frasa mengorbankan siapapun. Kita sedang berbagi dengan apa yang kita miliki dan berusaha agar tidak ada yang menjadi korban,” ujarnya.
Alinea 76	Ia menjelaskan, “jika ada investasi, yang terpenting pertama adalah konsumsi masyarakat terpenuhi. Kelebihannya bisa digunakan untuk investor.”
Alinea 77	“Listrik ini bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam satu malam. Pemerintah harus mengantisipasi kebutuhan listrik 10 hingga 15 tahun ke depan. Jadi, kalau sekarang sudah cukup, bagaimana dengan kebutuhan listrik tahun 2035?

	Kami sedang memastikan ketersediaan listrik untuk masa depan,” jelasnya.
Alinea 78	Terkait permintaan pencabutan SK, Hery menegaskan bahwa “hal itu sulit dilakukan mengingat proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional.”
Alinea 79	“Jika ditanya apakah saya akan mencabut SK? Tidak, saya tidak akan mencabut SK,” tegasnya.
Alinea 80	Pernyataan terakhir Nabit itu membuat perwakilan warga tidak puas, lalu memutuskan untuk walk out dari ruang audiensi.
Alinea 81	Setelah keluar dari kantor bupati, mereka menyampaikan kepada massa aksi bahwa Nabit menolak mencabut SK Penetapan Lokasi tersebut, hal yang memicu protes yang lebih besar dari ratusan massa yang menunggu di depan gedung itu.
Alinea 82	“Kalau memang begini, berarti Bupati Nabit tidak mendengar suara kami, kami akan terus bergerak sampai SK itu dicabut,” teriak salah satu peserta aksi.
Alinea 83	Proyek geothermal Poco Leok adalah pengembangan dari PLTP Ulumbu, tiga kilometer sebelah barat Poco Leok, yang sudah beroperasi sejak tahun 2012.

Alinea 84	Proyek itu ditargetkan menghasilkan energi listrik 2 x 20 megawatt, meningkat dari 10 megawatt yang sudah beroperasi saat ini.
Alinea 85	Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga, termasuk mengundang Bupati Nabit saat mengunjungi wilayah itu pada Februari 2023, dua bulan setelah dia meneken SK Penetapan Lokasi.
Alinea 86	Selain itu, warga juga melakukan pengadangan terhadap aktivitas PT PLN dan Badan Pertanahan yang dikawal ketat aparat keamanan di lahan ulayat mereka.
Alinea 87	Upaya lainnya adalah menyurati Bank Pembangunan Jerman Kreditanstalt für Wiederaufbau [KfW] sebagai pendana proyek.
Alinea 88	Hal itu direspons KfW dengan mengirimkan Tim Independen, yang kemudian menyatakan proyek tersebut melanggar standar sosial dan ekologi internasional, dan merekomendasikan pemerintah serta PT PLN mengulang seluruh proses proyek sejak awal.
Alinea 89	Warga juga mengirim surat dan berdialog secara daring dan luring dengan beberapa lembaga negara, di antaranya

	Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Ombudsman Republik Indonesia.
--	--

Sumber: Flores.co

Tabel 4.2

Teks Berita: Dinilai Kriminalisasi Pemuda Poco Leok dalam Proses Hukum Kasus Kerusakan Pagar Kantor Bupati, Polres Manggarai Diadukan ke Komnas HAM

Edisi: Kamis, 27 Maret 2025

Alinea	Isi Berita
Alinea 1	Koalisi Advokasi Poco Leok mengadukan Polres Manggarai ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM] di Jakarta terkait dugaan kriminalisasi dalam proses hukum terhadap Pemuda Poco Leok karena insiden kerusakan pagar kantor bupati saat unjuk rasa menolak proyek geotermal.
Alinea 2	Pengaduan itu disampaikan pada 25 Maret, menurut keterangan pers koalisi yang diterima Flores.
Alinea 3	Judianto Simanjuntak, kuasa hukum Pemuda Adat Poco Leok yang ikut bergabung dalam koalisi itu berkata,

	penanganan kasus kerusakan pagar ini oleh polisi adalah “keliru dan menyesatkan.”
Alinea 4	“Tidak ada indikasi dugaan tindak pidana pengrusakan,” katanya, merujuk pada pasal 170 ayat [1] KUHP Sub Pasal 406 KUHP Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHP yang dipakai polisi.
Alinea 5	Fakta yang sebenarnya, jelas dia, “adalah terjadi saling dorong gerbang kantor Bupati Manggarai” yang juga melibatkan polisi dan Satpol PP.
Alinea 6	“Akibatnya, gerbang kantor bupati tersebut jatuh ke arah massa aksi, bahkan hampir mengenai mereka,” katanya.
Alinea 7	Ia juga menekankan bahwa unjuk rasa warga menolak proyek geotermal Poco Leok “merupakan hak atas kebebasan mengeluarkan dan menyampaikan pendapat di muka umum.”
Alinea 8	Hak itu, katanya, dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, dan instrumen hukum lainnya.
Alinea 9	“Aksi tersebut merupakan upaya mempertahankan wilayah adat yang dijamin dalam instrumen hukum

	nasional dan hukum internasional, yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat,” kata Judianto.
Alinea 10	Pemuda Poco Leok melakukan aksi unjuk rasa di Ruteng pada 3 Maret, yang menasar kantor DPRD dan Bupati Manggarai.
Alinea 11	Di kantor bupati, mereka meminta Bupati Herybertus GL Nabit mencabut Surat Keputusan Penetapan Lokasi proyek itu yang dikeluarkan pada Desember 2022.
Alinea 12	Kerusakan pagar terjadi setelah audiensi dengan Nabit, di mana dia menolak tuntutan warga.
Alinea 13	Pada hari yang sama, Pemerintah Kabupaten Manggarai melapor ke polisi, yang direspons cepat dengan pemasangan garis polisi di lokasi dan pemanggilan warga koordinator aksi beberapa hari kemudian.
Alinea 14	Empat pemuda telah diminta keterangannya oleh polisi sebagai saksi kasus itu, dua orang koordinator aksi pada 17 Maret dan dua lainnya pada 24 Maret.
Alinea 15	Yulianto Behar Nggali Mara, staf Divisi Hukum dan Advokasi Kebijakan Jaringan Advokasi Tambang menyatakan, pemanggilan terhadap pemuda Poco Leok “merupakan kriminalisasi.”

Alinea 16	Ia menjelaskan, kriminalisasi itu juga terjadi sebelumnya ketika pada 2023 beberapa warga dipanggil karena melakukan pengadangan terhadap perwakilan perusahaan dan pemerintah.
Alinea 17	“Kriminalisasi berulang menunjukkan Polres Manggarai tidak memahami posisinya sebagai penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga negara sebagaimana mandat Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002,” katanya.
Alinea 18	Sementara itu, Ermelina Singereta, kuasa hukum lainnya menyatakan “sangat menyayangkan dan menyesalkan” upaya Polres Manggarai menindaklanjuti laporan.
Alinea 19	“Ini menunjukkan ketidakpekaan Polres Manggarai atas perjuangan masyarakat adat Poco Leok, khususnya kaum perempuan dalam rangka mempertahankan wilayah adatnya, yang selain merupakan sumber mata pencaharian juga merupakan identitas dan budaya mereka,” katanya.
Alinea 20	Ermelina berkata, pengaduan ke Komnas HAM dalam rangka permohonan agar lembaga negara itu menjalankan

	mandat memberikan perlindungan HAM kepada Pemuda Adat Poco Leok.
Alinea 21	Dalam pengaduan ini, katanya, mereka memohon kepada Komnas HAM “meminta keterangan Polres Manggarai terkait dengan kriminalisasi kepada Pemuda Adat Poco Leok.”
Alinea 22	Selain itu adalah menerbitkan surat perlindungan hukum kepada Pemuda Adat Poco Leok sebagai pejuang HAM yang layak mendapatkan perlindungan hukum.
Alinea 23	Mereka juga meminta Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Kapolri, Kapolda NTT dan Kapolres Manggarai agar menghentikan proses hukum.
Alinea 24	Judianto Simanjuntak berkata, mereka diterima oleh bagian pengaduan Komnas HAM, yang berjanji akan menindaklanjutinya.
Alinea 25	Ini bukan merupakan pengaduan pertama ke Komnas HAM terkait polemik proyek geotermal Poco Leok.
Alinea 26	Warga Poco Leok, dibantu koalisi, telah menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM pada 20 Oktober 2023.

Alinea 27	Dalam pengaduan itu mereka menyebut Polres Manggarai telah melakukan “intimidasi dan kriminalisasi” terhadap warga yang sedang mempertahankan tanah mereka.
Alinea 28	Selain itu, Jaringan Advokasi Tambang melayangkan pengaduan pada 10 Agustus 2023, sementara lembaga Gereja Katolik JPIC SVD Ruteng melayangkan surat pengaduannya pada 29 Agustus 2023.
Alinea 29	Sebagai tindak lanjut, pada akhir Oktober 2023 Komnas HAM melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada sejumlah pihak, yakni PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN, Badan Pertanahan Nasional dan Gubernur NTT.
Alinea 30	Pada 3 Maret tahun lalu, Komnas HAM juga telah berkunjung ke Poco Leok.
Alinea 31	Dalam laporan bertajuk “Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia” itu yang dirilis awal Desember tahun lalu, Komnas HAM ikut menyoroti polemik proyek ini. Laporan itu terkait sejumlah masalah-masalah yang muncul dalam implementasi Proyek Strategis Nasional [PSN] di seluruh Indonesia.
Alinea 32	Menurut Komnas HAM, selain khawatir dengan potensi kerusakan lingkungan, warga Poco Leok juga melaporkan

	kekerasan yang dilakukan aparat keamanan yang dimobilisasi oleh pemerintah daerah dan PT PLN.
Alinea 33	“Dalam keterangannya kepada Komnas HAM, pengadu menyampaikan berbagai tindakan represif dan kekerasan berupa dikeroyok, diinjak, dan dijatuhkan hingga ke selokan. Selain itu, dua perempuan diduga mengalami pelecehan seksual oleh anggota Polres Manggarai,” tulis Komnas HAM dalam laporan itu.
Alinea 34	Komnas HAM juga mengaku mendapat laporan soal jurnalis yang meliput aksi warga pada 2 Oktober yang juga menjadi korban kekerasan aparat kepolisian.
Alinea 35	Insiden itu terkait kekerasan oleh Polres Manggarai yang menangkap warga dan Pemimpin Redaksi Flores, Herry Kabut saat meliput aksi protes warga. Kasus ini kemudian berujung pada putusan adanya pelanggaran etik oleh anggota Polres Manggarai, Aipda Hendrikus Hanu.
Alinea 36	Proyek geotermal Poco Leok merupakan perluasan dari Pembangkit Listrik Panas Bumi Ulumbu, dengan target penambahan kapasitas 2×20 Megawatt.

Alinea 37	Warga telah menempuh berbagai cara untuk menyatakan penolakan karena titik-titik pengeboran yang dekat dengan pemukiman dan lahan mereka.
Alinea 38	Mereka telah bersurat kepada lembaga-lembaga negara dan kepada Bank Pembangunan Jerman Kreditanstalt für Wiederaufbau [KfW] sebagai pendana proyek.
Alinea 39	Tim Independen yang diutus Bank KfW juga telah melaporkan temuan lapangannya terkait proyek tersebut.
Alinea 40	Menurut tim tersebut, proyek ini tidak memenuhi standar-standar sosial internasional, termasuk menghormati hak dan budaya, menghindari dampak buruk pada masyarakat adat dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.
Alinea 41	Karena itu, tim tersebut merekomendasikan penghentian sementara proyek tersebut.

Sumber: Floresa.co

Tabel 4.3

Teks Berita: Teken SK Tanpa Sepengetahuan Warga hingga Anggap Rendah Sektor Pertanian, Apa Saja Upaya Nabit Paksakan Proyek Geothermal Poco Leok?

Edisi: Minggu, 13 April 2025

Alinea	Isi Berita
Alinea 1	Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebut ‘tidak ada negara yang maju karena pertanian,’ merespons beragam aksi penolakan warga Poco Leok terhadap proyek geotermal, yang salah satunya karena khawatir dengan keselamatan ruang hidup mereka.
Alinea 2	Pernyataan Nabit dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Manggarai tahun 2026 di Ruteng pada 26 Maret itu menuai tanggapan publik luas, di mana ia dinilai sedang ‘mengelabui pemilih yang mayoritas petani.’
Alinea 3	Kontroversi pernyataan itu muncul karena pada saat yang sama ia menyebut pertanian sebagai sektor andalan di Manggarai, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Alinea 4	Alih-alih pertanian, ia menyebut kunci kemajuan Manggarai adalah industrialisasi.

Alinea 5	Ini hanyalah salah satu dari upaya Nabit untuk meloloskan proyek perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 itu.
Alinea 6	Floresa merangkum sejumlah upaya Nabit yang ngotot agar proyek itu jalan di tengah resistensi warganya.
Alinea 7	Teken SK Tanpa Sepengetahuan Warga
Alinea 8	Protes warga Poco Leok selama beberapa tahun terakhir terutama menyoroti langkahnya menekan Surat Keputusan Penetapan Lokasi atau SK Penlok pada 1 Desember 2022.
Alinea 9	SK tersebut, yang diakui warga belum pernah mereka dapatkan wujud fisik suratnya, menetapkan beberapa wilayah ulayat sebagai wellpad atau titik pengeboran dan access road geothermal.
Alinea 10	Dalam berbagai kesempatan protes, warga dari belasan kampung adat atau gendang di Poco Leok menyatakan SK Penlok tersebut diteken Nabit secara sewenang-wenang tanpa sepengetahuan mereka.
Alinea 11	Saat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai di Ruteng pada 4 Juli 2023, perwakilan warga memprotes pengukuran lahan oleh

	lembaga itu di Lingko Tanggong, salah satu lahan ulayat milik Gendang Lungar.
Alinea 12	Mereka menyatakan keberatan dan menyayangkan tindakan BPN yang memasang pilar “tanpa konsultasi dan komunikasi dengan tokoh adat dan warga Gendang Lungar yang adalah pemilik sah atas Lingko Tanggong.”
Alinea 13	Merespons warga, Siswo Haryono, kepala kantor itu berkata mereka “hanya melaksanakan perintah dokumen,” merujuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, yang salah satunya berisi SK Penlok Nabit.
Alinea 14	Protes terkait SK itu juga dilayangkan warga dalam aksi unjuk rasa di Ruteng dan Jakarta, juga dalam berbagai surat yang dikirimkan kepada beberapa lembaga negara, termasuk kepada pendana proyek, yakni Bank Pembangunan Jerman atau Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Alinea 15	Terlibat Aktif Fasilitasi Proyek di Lapangan
Alinea 16	Nabit tercatat aktif mengerahkan para pegawai daerah, mulai dari asisten sekretariat daerah hingga aparat Pol PP mendampingi PT PLN dalam beragam aktivitas mereka di lokasi proyek di Poco Leok.

Alinea 17	Aktivitas itu yang makin masif usai Nabit menekan SK Penlok yang direspons warga dengan pengadangan di lapangan.
Alinea 18	Dalam catatan Floresa, lebih dari dua puluh kali warga Poco Leok mengadakan aktivitas lapangan itu, termasuk yang menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan.
Alinea 19	Pengadangan terakhir pada 2 Oktober 2024 menyebabkan lima warga sempat ditangkap dan ditahan, sementara Herry Kabut, pemimpin redaksi Floresa dianiaya aparat dan seorang jurnalis, Tery Janu.
Alinea 20	Salah satu aparat Polres Manggarai, Aipda Hendrikus Hanu telah dinyatakan melanggar etik dalam peristiwa itu.
Alinea 21	Sebelumnya, pada 27 Februari 2023, warga mengadakan dan menolak kedatangan Nabit ketika dia hendak menggelar dialog di Aula Stasi Lungar.
Alinea 22	Ratusan warga kala itu menuntutnya mencabut SK Penlok.
Alinea 23	Ia merespons langkah warga dengan berujar dalam Bahasa Manggarai: “Nggo’o de meu caran tiba meka? Eme nggooy caran, toe ma coon kole laku. Toe ma coon. E, toe ma coon. Bupati kaku! Bupati kaku! Bupati kaku!” – Begini cara kalian menerima tamu? Kalau begini caranya,

	bagi saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Saya bupati! Saya bupati! Saya bupati!
Alinea 24	Lapor Warga yang Unjuk Rasa
Alinea 25	Baru sehari pulang ret-ret dari Magelang, yang menandai permulaan periode kedua jabatannya sebagai bupati, Nabit diterima dengan aksi unjuk rasa Koalisi Pemuda Poco Leok.
Alinea 26	Aksi itu, yang berlangsung di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Manggarai pada 3 Maret berakhir dengan insiden kerusakan pagar kantor bupati, usai perwakilan warga menemuinya di ruang pertemuan kantor tersebut.
Alinea 27	Kerusakan pagar tersebut lantas membuat Nabit mengajukan laporan beberapa jam usai aksi, yang juga langsung direspons dengan gerak cepat polisi yang menyelidiki dan memasang garis polisi di lokasi kejadian.
Alinea 28	Empat pemuda telah diminta keterangannya oleh polisi sebagai saksi kasus itu – dua orang koordinator aksi pada 17 Maret dan dua lainnya pada 24 Maret.
Alinea 29	Pada 15 Maret, polisi menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Alinea 30	Koalisi Advokasi Poco Leok menilai langkah Nabit sebagai upaya kriminalisasi yang memperlemah perlawanan warga.
Alinea 31	Judianto Simanjuntak, salah satu kuasa hukum warga dari koalisi itu juga menilai penanganan kasus kerusakan pagar ini oleh polisi adalah “keliru dan menyesatkan.”
Alinea 32	Fakta yang sebenarnya, jelas dia, “adalah terjadi saling dorong gerbang” yang juga melibatkan polisi dan Satpol PP.
Alinea 33	“Akibatnya, gerbang kantor bupati tersebut jatuh ke arah massa aksi, bahkan hampir mengenai mereka,” katanya.
Alinea 34	Studi Banding bersama Kapolres di tengah Proses Hukum Warga
Alinea 35	Sementara proses hukum terhadap para demonstiran dari Koalisi Pemuda Poco Leok terus berlanjut, Nabit melakukan studi banding bersama Kapolres Manggarai AKBP Edwin Saleh ke lokasi proyek geotermal PLTP Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara.
Alinea 36	Studi banding itu, yang berlangsung beberapa hari sejak 9 Maret, juga mengikutsertakan Kepala Kejaksaan Negeri

	Ruteng, Fauzi dan Komandan Kodim 1612 Manggarai, Budiman Manurung.
Alinea 37	Selain itu, Sekretaris Daerah Fansy Aldus Jahang, Asisten Bidang Perekonomian Marianus Yosef Djelamu, Kepala Badan Kesbangpol Gondolpus B. Nggarang dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Livinus Vitalis Liven juga turut serta.
Alinea 38	Dari unsur legislatif, ada Ketua DPRD, Paulus Peos, Ketua Komisi B, Aventinus Mbejak dan Ketua Komisi C, DPRD Klementinus Malis.
Alinea 39	Studi banding yang dibiayai PT PLN itu mendapat sorotan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempersilakan pelaporan resmi dugaan gratifikasi oleh PT PLN. Selain KPK, Kejaksaan Tinggi NTT juga merespons kasus itu.
Alinea 40	Dugaan gratifikasi juga diungkapkan praktisi hukum Siprianus Edi Hardum, beralasan ada ‘kemesraan’ Nabit, Kapolres, Kejari dan PT PLN di tengah gelombang perlawanan warga.
Alinea 41	Sindir Penolakan Gereja Katolik

Alinea 42	Kontroversi lainnya yang dibuat Nabit dalam upayanya meloloskan proyek geotermal Poco Leok terungkap saat Musrenbang pada 26 Maret.
Alinea 43	Dalam acara tersebut, yang disiarkan langsung melalui Youtube Diskominfo Kabupaten Manggarai, Nabit mempersoalkan keterlibatan para uskup di wilayah Nusa Tenggara dan Bali dalam penolakan geotermal, menyebut “negara mengatasi agama-agama yang ada.”
Alinea 44	“Kalau mau bawa nilai-nilai agama sebagai awasan moral, oke, tapi menentukan kebijakan-kebijakan negara dengan agama, jangan,” lanjutnya.
Alinea 45	Pada bagian lain pidatonya, ia terhitung dua kali memakai kata “sembahyang” atau berdoa.
Alinea 46	Salah satunya saat berbicara terkait pabrik pengolahan komoditas lokal sebelum dipasarkan keluar daerah yang membutuhkan listrik.
Alinea 47	“Tidak pakai sembahyang proses ini. Kalau pakai sembahyang, tidak perlu listrik, sembahyang kat ga (tinggal berdoa saja),” katanya.

Alinea 48	Kata itu disinggung lain saat berbicara soal berbagai risiko proyek geotermal, menyebut tidak ada sesuatu tanpa risiko “di bawah kolong langit ini.”
Alinea 49	“Sembahyang pakai berlutut saja ada risikonya, ya to pak? Reu tu’us pe (lutut terluka),” ungkapnya.
Alinea 50	Remehkan Pertanian, Elukkan Industrialisasi
Alinea 51	Masih dalam pidato pada 26 Maret, Nabit menganggap remeh pertanian dan mengelukan industrialisasi.
Alinea 52	Anggapan Nabit bahwa pertanian tak membawa kemajuan bertolak belakang dengan ucapannya sendiri bahwa pertanian merupakan sektor andalan di Manggarai.
Alinea 53	Pada pilkada 2020, dia juga mengampanyekan janji peningkatan nilai tambah produk pertanian.
Alinea 54	Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi kopi – salah satu produk pertanian unggulan Manggarai – relatif stagnan selama satu dekade terakhir, yakni di angka 1.500ton hingga 2.500 ton per tahun. Sempat ada peningkatan tajam pada 2022 ke level 5.000 ton lebih, namun anjlok lagi ke level 2.500 ton pada 2023.

Alinea 55	Sementara produk lainnya, yakni kemiri, berada pada kisaran 700ton hingga 1.000ton selama satu dekade terakhir.
Alinea 56	Sama seperti produksi kopi, pada 2022 juga ada lonjakan drastis, tetapi kemudian turun signifikan lagi tahun berikutnya.
Alinea 57	Fluktuasi angka produksi itu dinilai bukan karena intervensi pemerintahan Nabit, melainkan lebih karena faktor cuaca.
Alinea 58	Nabit, yang menjanjikan insentif bagi petani milenial pada kampanye pilkada 2020, juga tak mampu mendongkrak produksi kedelai. Produksinya pada 2023 hanya 484 ton, turun drastis dari 2.913 ton pada 2018.
Alinea 59	Terus Ditentang Warga dan Gereja
Alinea 60	Proyek geothermal Poco Leok adalah bagian dari proyek strategis nasional dalam program elektrifikasi 35.000 megawatt.
Alinea 61	Selain di lokasi itu, belasan titik lainnya di Pulau Flores – yang ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi pada 2017 – juga telah dipetakan sebagai lokasi eksplorasi dan eksploitasi geothermal.

Alinea 62	Selain Flores juga terdapat beberapa titik di Pulau Lembata dan Alor, di sebelah timur.
Alinea 63	Warga di lokasi-lokasi itu hingga kini aktif melakukan protes dan perlawanan.
Alinea 64	Terakhir, gerakan perlawanan didukung partisipasi aktif Gereja Katolik, termasuk aksi unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan biarawan dan biarawati di Ngada, memprotes geothermal Mataloko pada 12 Maret.
Alinea 65	Para uskup se-Nusa Tenggara dan Bali juga menyatakan sikap penolakan melalui surat gembala bersama pada Maret, menyebut geothermal bukan pilihan di Pulau Flores dengan luas yang kecil dan kontur berbukit-bukit.
Alinea 66	Mereka juga menyatakan, geothermal tidak sejalan dengan arah utama pembangunan di Flores yang fokus pada sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan,
Alinea 67	Secara pribadi, Uskup Labuan Bajo Mgr Maksimus Regus dan Uskup Agung Ende Mgr Paulus Budi Kleden, SVD juga telah menyatakan sikap menolak proyek geothermal di wilayah kegembalaannya, yakni Wae Sano di Manggarai

	Barat dan Mataloko, Sokoria, Lesugolo dan beberapa lainnya di Kabupaten Ngada dan Ende.
--	---

Tabel 4.4

**Teks Berita: Warga Pendukung Geotermal Poco Leok Gelar Unjuk Rasa;
Dukung Langkah Nabit dan Persoalkan Sikap Gereja Katolik**

Edisi: Selasa, 22 April 2025

Alinea	Isi Berita
Alinea 1	Untuk pertama kalinya, warga yang mengklaim mendukung proyek geotermal di Poco Leok menggelar unjuk rasa menyusul sikap Gereja Katolik yang secara tegas menolak berbagai proyek di seluruh Flores.
Alinea 2	Aksi ini juga berlangsung usai Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan membentuk tim investigasi yang akan mengecek dan meminta penghentian sementara pengerjaan di semua lokasi proyek.
Alinea 3	Unjuk rasa pada 22 April itu berlangsung di Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai.

Alinea 4	Massa, yang mengenakan pakaian adat Manggarai dengan pita berwarna kuning pada lengan, mendatangi kantor DPRD dan kantor bupati.
Alinea 5	Pantauan Floresca, sejak pukul 11.00 Wita, mereka berkumpul di depan Kantor DPRD, sambil memegang sejumlah spanduk.
Alinea 6	Beberapa di antaranya bertuliskan: “Kami Masyarakat Adat Poco Leok Mendukung Penuh Program Geothermal,” “Panas Bumi Pemberi Harapan Hidup dan Kesejahteraan” dan “Tolong Pemimpin Gereja Jangan Berat Sebelah.”
Alinea 7	Sementara beberapa warga beraudiensi dengan anggota DPRD, warga lainnya menanti di depan kantor sambil sesekali berorasi.
Alinea 8	Pada pukul 13.15, di bawah pengawalan polisi, mereka bergerak menuju kantor bupati menggunakan tiga unit bus kayu, satu dump truck dan dua mobil sedan.
Alinea 9	Sementara beberapa warga menemui bupati dan membawa seekor ayam kampung, warga lainnya duduk di depan kantor dan mulai membagikan makan siang.

Alinea 10	Raymundus Wajong, penanggung jawab aksi berkata kepada Floresa di depan kantor bupati bahwa mereka hendak mendukung langkah Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit meloloskan proyek itu.
Alinea 11	Ia mengklaim peserta aksi berasal dari empat belas kampung adat atau gendang dan sembilan desa di wilayah Poco Leok. Peserta lainnya adalah pemilik lahan yang menjadi lokasi proyek geotermal.
Alinea 12	“Selama ini kami tidak (melakukan) aksi karena yakin dan percaya kepada pemerintah,” katanya.
Alinea 13	Raymundus mengklaim proyek geotermal Poco Leok tidak menemui masalah sejak sosialisasi pertama kali pada 2017.
Alinea 14	Namun, jelasnya, mulai ada hambatan setelah “warga diprovokasi” oleh lembaga Gereja Katolik dan sejumlah lembaga advokasi.
Alinea 15	Ia tidak menyebut nama lembaga-lembaga itu, namun “yang terang-terangan Pater Simon.”
Alinea 16	Ia merujuk pada Pastor Simon Suban Tukan, SVD, ketua lembaga Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Serikat Sabda Allah atau SVD Ruteng.

Alinea 17	Ditanyai terkait sikap enam uskup dari Nusa Tenggara dan Bali yang baru-baru ini menyatakan menolak proyek geotermal, Raymundus berkata ia menyesalkan langkah itu yang menurutnya tanpa pendasaran ilmiah.
Alinea 18	“Saya kira itu ranahnya pakar dan ahli di bidang itu. Nah, kira-kira uskup kajiannya apa?” katanya.
Alinea 19	Informasi yang diperoleh Flores, saat ini Raymundus tinggal di Kampung Wae Koe, Desa Legu. Kampung itu berjarak sekitar 30 kilometer sebelah selatan Poco Leok yang menjadi lokasi proyek.
Alinea 20	Raymundus juga ikut mewakili warga saat studi banding yang difasilitasi PT PLN pada bulan lalu di PLTP Lahendong, Sulawesi Utara.
Alinea 21	Bupati Nabit juga ikut dalam studi banding itu bersama jajaran pemerintah daerah, Kapolres Manggarai, Komandan Kodim 1612 dan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai.
Alinea 22	Kendati baru pertama kali menggelar unjuk rasa di Ruteng, dalam catatan Flores, sebelumnya Raymundus Wajong telah berulang kali menyatakan dukungannya terhadap proyek itu.

Alinea 23	Ia menjadi koordinator deklarasi mendukung geotermal di Lungar, salah satu kampung adat di Poco Leok pada 19 Juni 2023.
Alinea 24	Pada 2023, ia juga “menyerang” Pastor Simon dalam pernyataannya di media-media yang diduga berafiliasi dengan PT PLN.
Alinea 25	Salah satunya dalam berita media Infopertama.com pada 25 Juli 2023, di mana Wajong menyebut Pastor Simon “merekrut warga Poco Leok untuk menolak proyek.”
Alinea 26	Raymundus memiliki hubungan keluarga dengan Kornelis Wajong, pensiunan polisi yang pernah menjadi Wakil Kapolres Manggarai.
Alinea 27	Kornelis pernah datang ke Poco Leok pada 2023 bersama pimpinan PT PLN, aparat dan pemerintah setempat, yang disambut aksi protes warga, termasuk ibu-ibu.
Alinea 28	Dalam berita Swarantt.net pada 15 Juni 2024, Kornelis dan saudaranya yang lain, Klitus Wajong, menyebut Pastor Simon sebagai aktor intelektual penolakan geotermal.
Alinea 29	Pastor Simon belum pernah secara terbuka menanggapi tuduhan-tuduhan itu.

Alinea 30	Dalam salah satu wawancara dengan Flores, ia hanya berkata, berbagai tuduhan itu merupakan “risiko dari perjuangan, tapi kami tidak takut karena itu.”
Alinea 31	“Kami yakin bahwa kami memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.
Alinea 32	Selama setidaknya dua dekade terakhir bersama aktivis dari lembaga Gereja dan advokasi lain, ia telah terlibat dalam perjuangan bersama masyarakat di Flores bagian barat, termasuk dalam kasus pertambangan.
Alinea 33	Ia menekankan bahwa posisinya dalam polemik di Poco Leok adalah berdiri bersama warga yang sedang memperjuangkan hak.
Alinea 34	“Selain karena memang itu adalah prinsip perjuangan kami yaitu berada di tengah-tengah masyarakat, saya juga terlibat dalam advokasi kasus ini bersama teman-teman dari lembaga-lembaga lain karena diminta oleh masyarakat sendiri,” katanya.
Alinea 35	Ia juga mengaku tidak ingin agar polemik itu menimbulkan konflik horizontal di tengah warga, antara yang pro dan kontra.

Alinea 36	Proyek geotermal Poco Leok adalah perluasan PLTP Ulumbu yang telah beroperasi sejak 2011, menargetkan energi listrik 2×20 megawatt, meningkat dari 10 megawatt saat ini.
Alinea 37	Proyek ini adalah satu dari belasan lokasi di NTT yang tengah dalam proses eksplorasi dan eksploitasi geotermal, bagian dari program nasional elektrifikasi 35.000 megawatt.
Alinea 38	Lokasi lainnya adalah Wae Sano di Manggarai Barat; Mataloko dan Nage di Ngada; Sokoria di Ende; dan Atadei di Lembata. Selain itu Wae Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Komandaru, Detusoko, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Bukapiting, Roma-Ujelewung dan Oyang Barang.
Alinea 39	Warga Poco Leok merespons proyek ini dengan pro dan kontra.
Alinea 40	Warga yang kontra telah berulang kali menggelar aksi protes, beralasan adanya ancaman terhadap ruang hidup mereka.
Alinea 41	Dalam catatan Flores, mereka telah melakukan 27 kali aksi pengadangan di lokasi proyek terhadap aktivitas PT

	PLN, pemerintah daerah dan Badan Pertanahan yang dikawal ketat aparat keamanan.
Alinea 42	Beberapa di antaranya diwarnai represi.
Alinea 43	Sementara aksi unjuk rasa di Ruteng sudah dilakukan dua kali, yakni pada 9 Agustus 2023 dan 3 Maret 2025.
Alinea 44	Usai aksi pada 3 Maret, Bupati Nabit membuat laporan polisi terhadap beberapa pemuda yang terlibat aksi tersebut dengan tuduhan pengrusakan pagar kantor bupati.
Alinea 45	Langkah Nabit itu, yang direspons cepat oleh Polres Manggarai menuai kritik publik, menyebutnya sebagai bentuk kriminalisasi untuk memperlemah perlawanan warga.
Alinea 46	Merespons langkah Nabit dan penyidikan kasus itu oleh polisi, Koalisi Advokasi Poco Leok, kumpulan lembaga advokasi yang mendampingi warga, mengadakan Polres Manggarai ke Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional atau Kopolnas pada 16 April.
Alinea 47	Upaya lainnya yang dilakukan warga antara lain menyurati beberapa lembaga negara, termasuk Komnas HAM dan Ombudsman.

Alinea 48	Mereka juga menyurati pendana proyek tersebut, yakni Bank Pembangunan Jerman atau Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), yang direspons dengan mengirim tim independen untuk menyelidiki proyek pada September 2024.
Alinea 49	Tim independen itu telah merekomendasikan penghentian sementara seluruh aktivitas proyek karena dinilai tidak sesuai standar sosial dan lingkungan internasional.
Alinea 50	Sementara itu pada bulan lalu, enam uskup di Nusa Tenggara dan Bali yang masuk dalam Provinsi Gerejawi Ende menerbitkan pernyataan bersama menolak proyek-proyek geotermal di Flores.
Alinea 51	Mereka adalah Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD; Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kpong Kung; Uskup Maumere, Mgr. Martinus Ewaldus Sedu; Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hordat; Uskup Labuan Bajo, Mgr. Maksimus Regus dan Uskup Denpasar, Mgr. Silvester San.
Alinea 52	Dalam pernyataan itu, mereka menegaskan bahwa “eksploitasi sumber daya alam, termasuk energi geotermal di Flores dan Lembata, menimbulkan pertanyaan: Apakah

	kita membangun masa depan yang lebih baik atau justru merusaknya?”
Alinea 53	Mereka juga menyatakan Pulau Flores dan pulau-pulau kecil lainnya memiliki ekosistem yang rapuh dan berisiko besar, sehingga eksploitasi yang tidak bijaksana, termasuk proyek geotermal berdampak pada lingkungan, ketahanan pangan, keseimbangan sosial dan keberlanjutan kebudayaan.
Alinea 54	Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga telah menyatakan sikap untuk meninjau ulang proyek-proyek itu.
Alinea 55	Usai rapat koordinasi dengan para bupati dan walikota pada 9 April, ia menyatakan akan membentuk tim investigasi khusus yang beranggotakan perusahaan, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, maupun ahli lingkungan.
Alinea 56	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah menyatakan akan ke Ende untuk menemui Uskup Budi, yang telah secara terbuka menolak proyek geotermal pada 6 Januari.

Alinea 57	Sikap bersama para uskup pada bulan lalu muncul setelah adanya pernyataan Uskup Budi.
------------------	---

Sumber: Flores.co

Tabel 4.5

**Teks Berita: Disinformasi: Unjuk Rasa Warga Poco Leok Diprovokasi
LSM, Media Lokal dan Lembaga Gereja**

Edisi: Senin, 9 Juni 2025

Alinea	Isi Berita
Alinea 1	Usai aksi unjuk rasa ratusan warga Poco Leok di Ruteng pekan lalu, beberapa media siber secara massif menyebarkan berita yang menyebut warga diprovokasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media lokal dan lembaga Gereja Katolik.
Alinea 2	Selain memprovokasi, media dan lembaga-lembaga itu – yang namanya tidak disebut eksplisit – juga dituding mengkoordinasi aksi serta memainkan narasi “untuk membuat perseteruan yang panjang” antara warga dan Pemerintah Daerah.
Alinea 3	Berita lainnya juga menyebut warga meminta maaf terkait pernyataan dalam orasi yang memicu kemarahan Bupati

	Herybertus GL Nabit, hingga membuatnya mengarahkan massa tandingan mengadakan warga.
Alinea 4	Tudingan tersebut, misalnya diberitakan media Pijarflores.com dengan judul “LSM dan Media Lokal Ingin Perseteruan Panjang Warga Poco Leok dan Pemda, Padahal Tedi Sukardin CS Sudah Minta Maaf.”
Alinea 5	Media lainnya, Infopertama.com menulis berita berjudul “Orasi Warga Poco Leok Hina Bupati dan Masyarakat Manggarai, Ngaku Diperintah Simon”.
Alinea 6	Dalam paragraf pertama berita yang dimuat pada 9 Juni itu, Pijarflores.com menulis, warga Poco Leok “disuruh untuk berkata-kata kasar agar perseteruan semakin panjang antara mereka dengan pihak Pemerintah Daerah Manggarai.”
Alinea 7	Paragraf itu diikuti penjelasan terkait Tadeus “Tedi” Sukardin, warga Kampung Lungar yang berorasi menyebut geothermal menyebabkan polusi udara, lalu setelahnya “langsung mengisap rokok.”
Alinea 8	Media itu juga menyebut “Tedi CS” membuang bingkisan berisi “garam, lilin, batu, halia (jahe), dan kertas sepotong” di depan kantor bupati.

Alinea 9	Sementara Infopertama.com menulis, Wilhelmus – merujuk Wilhelmus Jehau, warga Kampung Mucu – mengaku orasinya yang menyebut Bupati Nabit sebagai “sampah” diperintah oleh “Pater Simon.”
Alinea 10	Media tersebut mengklaim mewawancarai Wilhelmus saat ia tengah menumpangi mobil ketika hendak pulang ke Poco Leok usai aksi.
Alinea 11	“Sayangnya, Wihelms enggan menjawab ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah Pater Simon yang dimaksud adalah Simon Suban Tukan dari JPIC SVD,” tulis media itu.
Alinea 12	Sementara itu, selain diberitakan kedua media tersebut, informasi terkait permintaan maaf warga kepada Nabit juga dilayangkan Swarantt.net dengan judul “Usai Demo Tolak Geothermal, Pengunjuk Rasa Minta Maaf dengan Bupati Hery Nabit”.
Alinea 13	Berita itu disertai foto Nabit bersama beberapa warga di samping salah satu mobil yang dipakai warga saat aksi.
Alinea 14	Klarifikasi Warga Poco Leok
Alinea 15	Floresa mewawancarai warga Poco Leok yang disebut dalam berita-berita tersebut di Ruteng pada 9 Juni.

Alinea 16	Tadeus Sukardin berkata, “kalau modal karang-karang fakta saja, kami juga bisa menulis.”
Alinea 17	“Semua informasi dalam media-media tersebut adalah fitnah,” katanya.
Alinea 18	Ia berkata, tudingan aksi warga diprovokasi LSM, lembaga Gereja dan media “secara logika tidak benar” karena “kami sendiri sedang berusaha mempertahankan tanah.”
Alinea 19	“LSM dan media tidak punya tanah di sana, yang pertahankan tanah itu kami yang punya tanah,” katanya.
Alinea 20	Hal senada disampaikan Wilhelmus Jehau, yang menyebut media-media tersebut menyebarkan kebohongan.
Alinea 21	“Kami menghadapi orang luar yang sedang merampas hak-hak kami, lalu untuk apa ada orang lain lagi yang memprovokasi kami untuk mempertahankan hak milik kami?”
Alinea 22	Ia berkata, berita media-media tersebut “di luar otak sehat” dan “tidak berdasar.”
Alinea 23	Kejahatan Informasi
Alinea 24	Sementara Yudi Onggal, pemuda asal Kampung Lungar yang juga menjadi orator aksi berkata, penyebaran berita-

	berita tersebut “adalah bagian dari kejahatan informasi yang sengaja dilakukan untuk membohongi publik.”
Alinea 25	“Bagi orang yang belum tahu konteks perlawanan kami, berita seperti itu membentuk pemahaman yang keliru. Apalagi untuk pendukung Bupati Nabit, itu menambah kebencian pada kami yang sebetulnya sedang bersusah payah melawan perampasan dan pengrusakan ruang hidup,” katanya.
Alinea 26	Unjuk rasa, kata Yudi, lahir dari kesadaran dan inisiatif warga sendiri “berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.”
Alinea 27	“Orang Poco Leok berjuang tidak pernah berpatokan pada siapapun, karena ini persoalan kami sendiri,” katanya.
Alinea 28	“Aksi yang sudah berjalan sejauh ini, 27 kali di Poco Leok dan tiga kali di Ruteng, dirancang bersama-sama oleh warga sendiri dan sudah direncanakan jauh-jauh hari,” lanjutnya.
Alinea 29	Yudi juga menegaskan bahwa warga “tidak akan berhenti di sini.”

Alinea 30	“Akan ada banyak aksi ke depannya sejauh Nabit tidak mencabut SK Penetapan Lokasi geotermal di ruang hidup kami, dan ini adalah komitmen kami,” katanya.
Alinea 31	Pencabutan SK itu merupakan inti desakan mereka saat berunjuk rasa di depan kantor bupati.
Alinea 32	Mayo Dintal, pemuda lainnya yang ikut dalam aksi itu berkata, “ini bukan pesanan seperti berita yang ditulis media-media itu.”
Alinea 33	“Logikanya, bagaimana mungkin orang dibayar oleh orang lain lagi untuk mempertahankan keselamatan dirinya sendiri?” katanya.
Alinea 34	Wilhelmus: “Tidak Ada Wartawan yang Wawancarai Saya”
Alinea 35	Terkait tudingan yang menyebut dirinya mengaku disuruh Pater Simon, Wilhelmus berkata “tidak ada satupun wartawan yang mewawancarai saya saat aksi itu.”
Alinea 36	Ia menjelaskan, usai berorasi pada siang itu, “ada orang berjaket merah yang terus menerus memantau dan mengikuti pergerakan saya di tengah massa aksi.”

Alinea 37	Saat hendak naik ke mobil, katanya, orang itu menarik kaki dan kain songke yang dipakainya, bahkan “ikut naik lewat samping mobil untuk mengancam saya.”
Alinea 38	“Seorang lainnya ikut memukul kaki saya saat itu. Orang itu juga yang menarik syal songke saya dari arah belakang mobil hingga leher saya tercekik,” katanya.
Alinea 39	Wilhelmus berkata, dua orang itu tidak mewawancarainya, juga tidak ada satupun pertanyaan terkait “siapa yang menyuruh kami melakukan aksi unjuk rasa.”
Alinea 40	“Mereka hanya terus-menerus menyuruh saya turun dari mobil sambil bilang; ‘kau harus klarifikasi dulu kepada polisi supaya masalahnya cepat selesai’,” katanya.
Alinea 41	Aksi keduanya, kata Wilhelmus, baru berhenti setelah didesak beberapa warga lainnya dan ditegur oleh beberapa polisi.
Alinea 42	“Nabit yang Minta Maaf pada Kami”
Alinea 43	Sementara itu, terkait informasi yang menyebut warga meminta maaf kepada Nabit di kantor Polres Manggarai, Tadeus berkata “justru bupati yang meminta maaf kepada kami.”

Alinea 44	“Dia (Nabit) keluar lewat halaman belakang kantor polisi menuju warga yang sedang di atas mobil, lalu dalam Bahasa Manggarai menyampaikan permohonan maaf,” katanya.
Alinea 45	Nabit juga memberi tahu mereka bahwa dirinya marah karena warga menyebutnya “sampah” saat berorasi.
Alinea 46	“Kami memang berjabat tangan dengannya di halaman belakang Polres, tetapi saya tidak mengucapkan kata-kata permintaan maaf,” lanjutnya.
Alinea 47	Ia berkata, seseorang yang tak dikenal sempat mendekati warga yang tengah diamankan polisi dari amukan massa yang dipimpin Nabit saat itu.
Alinea 48	“Dia meminta kami menyampaikan permohonan maaf kepada Nabit,” katanya.
Alinea 49	Hal itu ditolak warga, kata Tadeus, karena “kami harus berdiskusi dahulu dengan semua orang Poco Leok sebelum mengeluarkan pernyataan.”
Alinea 50	Selain itu, katanya, Nabit juga menyampaikan rencananya mengunjungi keluarganya di Kampung Mucu, salah satu kampung adat di Poco Leok “minggu depan”.

Alinea 51	Aksi unjuk rasa warga Poco Leok pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni, berakhir sebelum waktunya karena Nabit memimpin massa tandingan mengadang mereka.
Alinea 52	Pengadangan itu membuat mayoritas warga langsung kembali ke kampung mereka dengan pengawalan aparat, sementara yang lainnya sempat diamankan di dalam kantor polisi setelah dikejar oleh massa Nabit yang mencapai puluhan orang.
Alinea 53	Mereka baru kembali ke Poco Leok pada pukul 17.00 Wita dengan pengawalan polisi.
Alinea 54	Serangan Melalui Media
Alinea 55	Bukan baru kali ini media-media tersebut menyebarkan disinformasi terkait polemik perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 di Poco Leok.
Alinea 56	Disinformasi adalah informasi keliru yang sengaja disebarluaskan, meski orang yang menyebarkannya tahu bahwa isinya salah.
Alinea 57	Laporan Floresia pada Februari tahun lalu mengungkapkan bahwa Pijarflores.com menyebarkan disinformasi terkait klaim PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah

	melakukan sosialisasi FPIC [Free, Prior, and Informed Consent], salah satu tahap dalam proyek itu.
Alinea 58	Berdasarkan penelusuran fakta di Dusun Lengkong, 300 meter sebelah timur dari lokasi PLTP Ulumbu pada 28 Februari 2024, warga berkata “tidak ada pembicaraan tentang rencana perluasan geotermal Poco Leok dan dampaknya bagi masyarakat” dalam sosialisasi itu.
Alinea 59	Disinformasi lainnya dilakukan media-media yang sama, termasuk Fokusntt.com, Koranntt.com, Kundurnews.co.id dan Kabarpesisirnews.com pada November 2024, menyebut Floresa memprovokasi warga menolak proyek tersebut.
Alinea 60	Pada 7 Desember 2024, Rikardus G. Huwa dan media yang dipimpinnya, Pijarflores.com, menerbitkan hak jawab dan menyatakan permintaan maaf “dari hati yang paling dalam” kepada Floresa setelah diputuskan bersalah oleh Dewan Pers
Alinea 61	Media-media tersebut juga beberapa kali melancarkan serangan terhadap Pater Simon Suban Tukan, SVD dari JPIC SVD Ruteng.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

4.3.1 Teknik Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer mengenai cara portal berita Floresa.co mengemas dan menyajikan pemberitaan terkait pembangunan geothermal di Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap isi teks berita yang dipublikasikan di situs resmi Floresa.co, dengan tujuan menelusuri dan menganalisis penerapan elemen-elemen jurnalisme menurut Bill Kovach.

Peneliti secara sistematis melakukan penelusuran arsip berita di portal Floresa.co yang memuat isu pembangunan geothermal Poco Leok, khususnya dalam periode waktu tertentu yang menjadi fokus kajian.

Selain konten utama berita, peneliti juga mengamati judul, subjudul, kutipan narasumber, penempatan fakta, dan penggunaan sumber informasi, yang semuanya dihubungkan dengan indikator-indikator dari lima elemen jurnalisme Kovach. Melalui proses observasi ini, peneliti memperoleh gambaran awal mengenai sejauh mana berita-berita yang dipublikasikan oleh Floresa.co mengimplementasikan prinsip jurnalisme.

4.3.2 Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dilakukan dengan mengarsipkan dan menyimpan bukti visual berupa gambar tangkapan layar (screenshot) dari teks-teks berita yang menjadi objek observasi penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mendukung validitas data serta menyediakan bukti

konkret dari isi pemberitaan yang dianalisis dalam konteks penerapan elemen-elemen jurnalisme Bill Kovach.

Gambar 4.1



Sumber: Floresa.co

Gambar di atas merupakan hasil *screenshot* peneliti pada Portal Berita *Online* Floresa.co dan berita ini menyoroti aksi protes masyarakat saat pelantikan Bupati Manggarai periode kedua

Gambar 4.2



Sumber: Floresa.co

Gambar di atas merupakan hasil screenshot peneliti pada Portal Berita Online Floresa.co dan berita ini memperlihatkan upaya warga melaporkan tindakan aparat ke Komnas HAM.

Gambar 4.3



Sumber: Floresa.co

Gambar di atas merupakan hasil *screenshot* peneliti pada Portal Berita Online Floresa.co dan berita ini memperlihatkan apa saja upaya nabit paksakan proyek Geothermal Poco Leok.

Gambar 4.4



Sumber: Floresa.co

Gambar di atas merupakan hasil *screenshot* peneliti pada Portal Berita Online Floresa.co dan berita ini memperlihatkan bagaimana warga pendukung Geothermal menggelar unjuk rasa sebagai dukungan akan langsung akan proyek Geothermal.

Gambar 4.5



Sumber: Floresa.co

Gambar di atas merupakan hasil screenshot peneliti pada Portal Berita Online Floresa.co dan berita ini memperlihatkan bagaimana unjuk rasa warga Poco Leok diakibatkan provokasi LSM, Media lokal dan lembaga Gereja.